PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan peraturan daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Biro adalah Biro Organisasi dan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
8. Pemrakarsa adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah termasuk Pemrakarsa di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
10. Naskah Akademik rancangan Perda adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta ruang lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan Perda, yang secara konseptual ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Prolegda adalah dokumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN MATERI MUATAN PERDA

Pasal 2

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Perda mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan kepastian hukum.

Pasal 4

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERSIAPAN PEMBENTUKAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah

Pasal 5

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun Perda berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Biro.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan peraturan daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Perda di luar Prolegda.
- (2) Rancangan Perda di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Pimpinan SKPD dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Gubernur, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Rancangan Perda di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh DPRD dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Prolegda ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang terdiri dari :

- a. Prolegda jangka panjang ditetapkan setiap lima tahun; dan
- b. Prolegda jangka pendek ditetapkan setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi.
- (2) Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Daftar rancangan Perda yang tersusun dalam prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di surat kabar lokal untuk diketahui oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Persiapan Pembentukan Rancangan Perda

Pasal 10

- (1) Dalam mempersiapkan rancangan Perda, Pemrakarsa wajib terlebih dahulu menyusun naskah akademik.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal :
 - a. rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD;
 - b. rancangan Perda yang hanya bermaksud merubah tarif atau yang hanya merubah beberapa ketentuan dalam Perda yang telah ada;

- c.rancangan Perda yang bersifat mendesak setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.
 - (4) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Biro atau bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diatur dalam Perda.
 - (5) Naskah akademik disertakan dalam pembahasan rancangan Perda.
 - (6) Pedoman penyusunan Naskah Akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda serta naskah akademik oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepada Biro untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda, Gubernur membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai Ketua;
 - b. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Biro sebagai sekretaris;
 - d. Unsur satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait sebagai anggota;
 - e. Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
 - b. membuat daftar inventarisasi masalah;
 - c. membahas dan menyempurnakan rancangan Perda;
 - d. Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Biro.

Pasal 13

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I, pembahasan daftar inventarisasi masalah rancangan Perda;
 - b. Tahap II, pengambilan keputusan atas rancangan Perda.
- (2) Pembahasan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan kepada SKPD terkait dan/atau stakeholder yang berkepentingan;
 - b. rapat pembahasan antar instansi;
 - c. Instansi vertikal di daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Pembahasan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pembicaraan Tahap I;
 - b. pendapat akhir Tim Asistensi Pembahasan rancangan Perda.